



PEKERJA DAN PELAKU USAHA KRITISI PPKM Beban Makin Berat, Dibutuhkan Stimulus

YOGYA (KR) - Para pekerja berbagai sektor dan pelaku usaha di DIY mengkritisi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dinilai semakin memberatkan beban di tengah himpitan pandemi Covid-19 ini.

Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) DIY bahkan mendesak Pemerintah Pusat untuk menghentikan PPKM. Kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 ini dirasa justru membuat rakyat semakin terpuruk.

"PPKM berdampak tutupnya sektor wisata, pusat keramaian, pendidikan sekolah dan kampus, pusat-pusat perbelanjaan, bangkrutnya para pedagang pasar, sulitnya kondisi hotel



KR-Juvintarto

Aksi menolak PPKM oleh K-SBSI di Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta.

dan restoran, dan jatuhnya omzet pedagang kuliner yang menimbulkan penderitaan luar biasa," tegas Ketua Serikat Buruh K-SBSI DIY Dani Eko Wiyono ST MT di sela aksi bersama, Rabu (18/8) di Titik Nol

Kilometer Yogyakarta.

Aksi diikuti terbatas 200-an peserta dari unsur buruh, pekerja pabrik, pekerja seni budaya, pekerja sektor pariwisata, pekerja sektor pendidikan, dan pengusaha kuliner.

* Bersambung hal 7 kol 1

Beban

Mereka juga membagikan paket sembako kepada masyarakat di sekitar Titik Nol menyasar tukang becak, tukang parkir, penjual angkringan, dan pedagang kakilima (PKL) yang mengalami penurunan penghasilan dan diharapkan dapat mengurangi beban.

"Pemda DIY harusnya berpikir lebih kreatif dan jernih dalam menyikapi pandemi dan tidak semata-mata semua peraturan yang dibuat berdasarkan arahan dari pusat," tegas Dani.

Secara terpisah, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DIY juga berharap ada keberpihakan Pemerintah dengan memberikan stimulus maupun kompensasi berupa insentif maupun subsidi selama PPKM Level 4 yang terus diperpanjang. Diharapkan kebijakan pembatasan tidak terus-terusan diperpanjang karena dikhawatirkan

bisa menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua APPBI DIY Surya Ananta mengatakan, dalam kondisi sekarang meskipun ada tenant khusus yang tetap diperbolehkan operasional, tetapi hanya sedikit sekali. Jika PPKM terus diperpanjang, para pengelola pusat perbelanjaan sudah tidak kuat bertahan, terutama para tenant yang memiliki karyawan yang sangat banyak hingga ribuan orang.

"Contohnya karyawan yang bekerja di Plaza Ambarrukmo saja lebih dari 2.000 orang, belum tujuh mal lainnya di DIY. Kami punya harapan, mohon bisa diambil kebijakan bagaimana caranya, dengan syarat ketentuan yang ketat kita bisa beroperasi di tengah PPKM," tutur Surya kepada KR.

Surya menyampaikan, pihaknya

Sambungan hal 1

berusaha memenuhi syarat dan ketentuan tersebut agar bisa beroperasi kembali supaya ada aktivitas ekonomi. Tidak adanya aktivitas inilah yang semakin memperburuk nasib karyawan yang posisinya nyata dirumahkan saat ini. Setidaknya kondisi karyawan tenant masih dirumahkan tanpa pendapatan, namun belum sampai di-PHK.

Sekda DIY Baskara Aji menyatakan, pihaknya bisa memahami adanya dampak dari kebijakan PPKM. Termasuk soal belum diperbolehkannya mal di DIY untuk beroperasi. Meski begitu karena DIY menjadi salah satu wilayah aglomerasi, maka harus menaati kebijakan Pemerintah Pusat termasuk berkaitan dengan perpanjangan PPKM Level 4. Karena kalau DIY tidak mengikuti kebijakan tersebut akan ada persoalan.

(Vin/Ira/Ria)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005